



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI**

Alamat : Jalan Pasantren Km 2, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513

Telepon : (022) 6652326; Faksimile (022) 6654698, 6650540

Laman : bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id ~ Posel : bbppmpv.bmti@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
NOMOR : 4666/D6.5/PR.00.02/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
TAHUN 2025-2029**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

M E M U T U S K A N

- KESATU : Rencana Strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029;
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, penyesuaian terhadap Renstra dapat dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 7 Desember 2025



Dr. Anwar Sidarta, S.Si., M.Si.
NIP 197305061994121001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan fundamental yang menjadi tumpuan utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional berperan strategis dalam membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, produktif, serta mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda utama melalui Transformasi Sosial, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengemban mandat strategis untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu diarahkan untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional. Upaya tersebut dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan pendidikan yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Pendidikan vokasi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan siap kerja. Dalam menghadapi dinamika transformasi ekonomi, perkembangan teknologi industri, serta perubahan kebutuhan dunia kerja, pendidikan vokasi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis, karakter kerja, dan kemampuan adaptif yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Vokasi PKPLK) sebagai unit eselon I di lingkungan Kemendikdasmen memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan vokasi yang bermutu, inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Rencana Strategis Ditjen Vokasi PKPLK menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan vokasi yang selaras dengan arah kebijakan kementerian dan tujuan pembangunan nasional.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Vokasi PKPLK, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) berperan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi melalui pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pendampingan satuan pendidikan vokasi, serta penguatan sistem penjaminan mutu khususnya pada bidang (i) Teknologi Konstruksi dan Bangunan; (ii) Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; (iii) Energi dan Pertambangan; dan (iv) Teknologi Informasi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan daya saing nasional.

Sejalan dengan mandat tersebut, penyusunan Rencana Strategis BBPPMPV BMTI Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam memastikan arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik industri dilaksanakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional dan kebijakan Kemendikdasmen.

1.1. Kondisi Umum

Memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tahun 2024, pemerintah melakukan restrukturisasi kementerian yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini secara resmi membentuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan menata kembali urusan pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Dalam struktur kelembagaan tersebut, dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Vokasi, PK dan PLK) sebagai unit eselon I yang membawahi balai-balai pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi. BBPPMPV BMTI ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Vokasi, PK dan PLK) dengan peran strategis dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi di bidang mesin dan teknik industri.

Dalam melaksanakan mandat kelembagaannya, BBPPMPV BMTI bertugas mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, baik dalam bentuk upskilling maupun reskilling yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penguatan kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan pedagogik, manajerial, serta integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, BBPPMPV BMTI berperan memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan SMK memiliki kapasitas yang relevan dengan perkembangan teknologi industri, transformasi digital, serta tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain fungsi pengembangan kompetensi, BBPPMPV BMTI juga melaksanakan fungsi penjaminan mutu pendidikan vokasi melalui berbagai bentuk pendampingan kepada satuan pendidikan. Pendampingan tersebut meliputi penguatan implementasi kebijakan nasional, pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi, pengembangan model pembelajaran berbasis dunia kerja, serta fasilitasi peningkatan kualitas tata kelola pembelajaran. Peran ini menempatkan BBPPMPV BMTI tidak hanya sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai mitra strategis satuan pendidikan dalam memastikan mutu pembelajaran vokasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam konteks wilayah binaan, BBPPMPV BMTI memberikan layanan kepada pendidik dan satuan pendidikan vokasi di 15 provinsi, yang mencakup wilayah barat hingga timur Indonesia. Luasnya cakupan layanan ini menunjukkan peran balai sebagai simpul penguatan mutu pendidikan vokasi yang berkontribusi pada pemerataan kualitas pendidikan kejuruan secara nasional. Melalui interaksi langsung dengan satuan pendidikan, BBPPMPV BMTI memperoleh gambaran riil mengenai kebutuhan kompetensi pendidik, dinamika implementasi pembelajaran praktik, serta tantangan yang dihadapi SMK dalam menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan industri.

1.1.1. Capaian BBPPMPV BMTI pada periode 2020-2024

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI selama periode tahun 2020-2024, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan sebagai turunan dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kedua sasaran kegiatan tersebut menjadi fokus utama dalam memastikan kontribusi balai terhadap peningkatan mutu pendidikan vokasi dan penguatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan pertama, yaitu [SK.1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, diarahkan untuk memastikan bahwa

layanan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan BBPPMPV BMTI mampu menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Sasaran ini mencerminkan peran strategis balai sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi, khususnya dalam mendukung kebijakan *link and match*, transformasi digital pembelajaran, serta penguatan standar industri dalam pendidikan vokasi.

Sementara itu, Sasaran Kegiatan kedua, yaitu [SK.2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri, difokuskan pada penguatan manajemen kinerja, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya organisasi. Sasaran ini menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan peningkatan mutu vokasi dilaksanakan secara terencana, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian kedua Sasaran Kegiatan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan aspek peningkatan mutu layanan pendidikan vokasi maupun penguatan tata kelola kelembagaan. Indikator-indikator tersebut menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi capaian kinerja balai secara kuantitatif dan kualitatif, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Selanjutnya, uraian capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan disajikan secara terperinci untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja BBPPMPV BMTI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi dan penguatan tata kelola organisasi.

1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.

a. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Target jumlah pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi di BBPPMPV BMTI dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel Capaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Per Tahun (orang)					Total Target Capaian
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Guru Kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja		1728	1987	864	1084	5663
2.	Guru yang mendapatkan kompetensi bidang mesin dan teknik industri	3636					3636
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri		2.874	1808	2328	2427	9437
4.	Instruktur Kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan		76	68	40	63	247

Selama periode Renstra 2020–2024, BBPPMPV BMTI menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Capaian pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja mencapai 5.663 guru. Penguatan kompetensi bidang mesin dan teknik industri pada tahun 2020 sebanyak 3.636 guru mencerminkan fokus awal pada penguatan kompetensi teknis inti.

Program *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar Industri sebanyak 9.437 peserta selama 2021–2024, menunjukkan orientasi yang semakin kuat pada standar industri dan kebijakan *link and match*. Sementara itu, pelatihan instruktur kursus bidang teknologi terapan sebanyak 247 orang tetap memiliki nilai strategis meskipun disesuaikan dengan pagu anggaran.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan konsistensi peran BBPPMPV BMTI dalam pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan industri dan peningkatan mutu pendidikan vokasi secara berkelanjutan.

Layanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi merupakan salah satu layanan utama BBPPMPV BMTI yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan vokasi. Layanan ini diselenggarakan secara berkelanjutan guna memastikan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki

kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, BBPPMPV BMTI melaksanakan layanan pengembangan kompetensi PTK vokasi pada wilayah binaan yang mencakup 15 provinsi, yaitu 1). Provinsi Bengkulu, 2). Provinsi Lampung, 3). Provinsi Banten, 4). Provinsi DKI Jakarta, 5). Provinsi Jawa Barat, 6). Provinsi Jawa Tengah, 7). Provinsi D.I Yogyakarta, 8). Provinsi Kalimantan Timur, 9). Provinsi Kalimantan Utara, 10). Provinsi Papua Barat, 11). Provinsi Papua, 12). Povinsi Papua Tengah, 13). Provinsi Papua Pegunungan, 14). Provinsi Papua Barat Daya dan 15). Provinsi Papua Selatan. Peta sebaran PTK di wilayah binaan tersebut mencerminkan cakupan layanan BBPPMPV BMTI yang luas dan strategis, serta menegaskan peran balai dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan vokasi di berbagai daerah.



Gambar peta sebaran guru BBPPMPV BMTI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2024, bidang kompetensi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wilayah binaan BBPPMPV BMTI dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yaitu Teknologi Informasi; Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; Energi dan Pertambangan; serta Teknologi Konstruksi dan Properti.

Mengacu pada pengelompokan bidang kompetensi tersebut, sebaran SMK di seluruh Indonesia menunjukkan variasi jumlah satuan pendidikan pada masing-masing bidang. Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi Manufaktur dan Rekayasa memiliki jumlah SMK terbanyak, masing-masing sebanyak 6.274 SMK dan 6.182 SMK, diikuti oleh bidang Energi dan Pertambangan sebanyak 1.221 SMK, serta Teknologi Konstruksi dan Properti sebanyak 722 SMK.

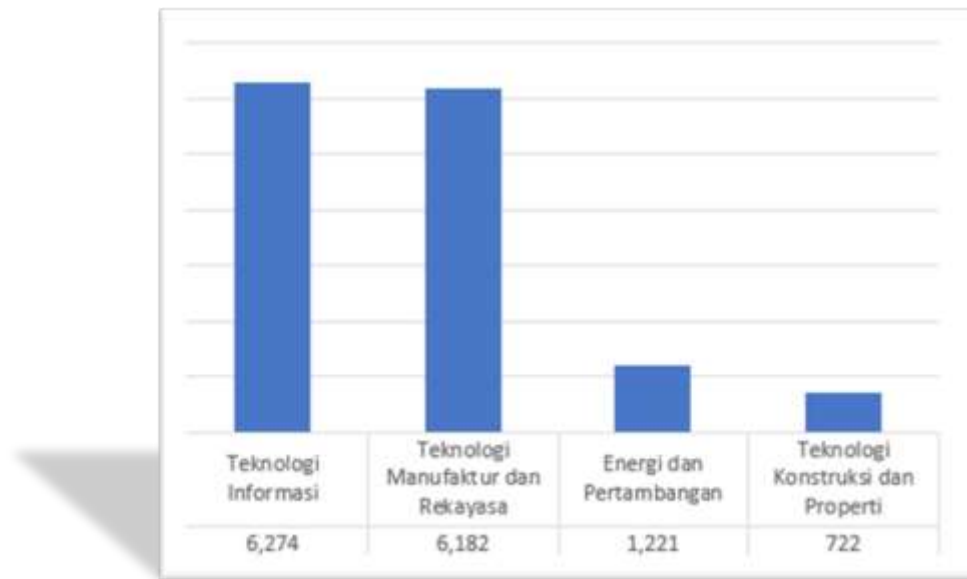


Diagram bidang kompetensi keahlian SMK di BBPPMPV BMTI

Sebaran bidang kompetensi SMK sebagaimana tergambar dalam diagram tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BBPPMPV BMTI, khususnya dalam memastikan layanan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan karakteristik bidang kompetensi, kebutuhan satuan pendidikan, serta tuntutan dunia kerja.

b. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan dengan hasil baik

Target jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan dengan hasil baik dari tahun 2020 – 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan dengan hasil baik tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Per Tahun					Total Capaian
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan dengan hasil baik		275	1010	729	1158	3172

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan dengan hasil baik menunjukkan capaian kumulatif sebesar 3.172 satuan pendidikan selama periode 2020–2024. Pelaksanaan indikator ini mulai dioptimalkan pada

tahun 2021 melalui 3 (tiga) provinsi wilayah binaan yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Penguatan program Perencanaan Berbasis Data (PBD), yang mendorong satuan pendidikan vokasi memanfaatkan data rapor pendidikan dan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana peningkatan mutu. Pada tahun 2021 capaian menjadi 1.010 satuan pendidikan mencerminkan efektivitas implementasi pendekatan berbasis data dalam proses pemetaan mutu.

Pada tahun-tahun berikutnya, capaian mengalami dinamika dengan angka 729 pada 2022 dan meningkat kembali menjadi 1.158 pada 2023. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, prioritas program nasional, serta kapasitas anggaran untuk pendampingan yang tersedia. Meskipun demikian, proses pemetaan mutu tetap berjalan secara berkelanjutan melalui penguatan pendampingan dan monitoring terhadap satuan pendidikan vokasi di wilayah binaan.

b. Pendampingan pelaksanaan *Tracer Study*

Tracer Study (TS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perdirjen Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Tracer Study merupakan survei terukur terhadap lulusan pendidikan vokasi yang dilaksanakan setelah lulus untuk mengetahui kondisi bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha, serta wajib dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun oleh seluruh satuan pendidikan vokasi sebagai bagian dari tugas pokok dalam sistem pendidikan vokasi.



Tabel prosentase lulusan yang mengisi TS tahun 2024-2025

Capaian tracer study pada wilayah binaan BBPPMPV BMTI tahun 2024–2025 menunjukkan kinerja yang secara umum baik dengan tingkat partisipasi lulusan berada pada rentang 70%–90%. Pada tahun 2024, capaian tertinggi terdapat di Bengkulu sebesar 93,12%, disusul Lampung 83,83% dan Jawa Barat 71,82%, sedangkan pada tahun 2025 capaian tertinggi dicapai Lampung sebesar 89,85%, diikuti Bengkulu 74,09% dan Jawa Barat yang relatif stabil sebesar 71,14%. Dinamika capaian antarwilayah dan antar tahun tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan tracer study telah berjalan efektif, namun masih memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi pendampingan satuan pendidikan, serta peningkatan partisipasi lulusan, khususnya pada wilayah dengan jumlah lulusan yang besar, guna memastikan ketersediaan data tracer study yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan dan peningkatan relevansi lulusan pendidikan vokasi terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri.

c. Pendampingan Asesmen Nasional

Asesmen Nasional bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif berupa literasi membaca dan numerasi, hasil belajar nonkognitif yang mencerminkan karakter dalam Profil Pelajar Pancasila, serta kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Pelaksanaan AN dilakukan satu kali dalam satu tahun dan mencakup satuan pendidikan formal serta program pendidikan kesetaraan.



Gambar diagram Satpen yang didampingi periode 2024-2025

Dalam mendukung keterlaksanaan Asesmen Nasional, BBPPMPV BMTI melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan sejak tahap persiapan hingga

pelaksanaan melalui pendampingan teknis, penguatan pemahaman kebijakan, serta fasilitasi kesiapan satuan pendidikan di wilayah binaan Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Namun demikian, capaian pendampingan pada tahun 2024–2025 menunjukkan penurunan jumlah satuan pendidikan yang didampingi, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, di mana pada tahun 2024 pendampingan menurun signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan penjaminan mutu pelaksanaan Asesmen Nasional, sehingga diperlukan penguatan kebijakan penganggaran, prioritas sasaran, serta pengembangan skema pendampingan yang lebih efisien dan berkelanjutan agar pelaksanaan AN dapat berlangsung secara terarah, tertib, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d. Pendampingan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik

Pendampingan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik. Kebijakan ini disusun untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan pelaksanaan tes terstandar yang objektif, transparan, akuntabel, dan terukur secara nasional dalam mengukur pemenuhan standar kemampuan akademik murid sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Dalam mendukung keterlaksanaan TKA, BBPPMPV BMTI melaksanakan penjaminan mutu melalui pendampingan menyeluruh kepada satuan pendidikan, yang diawali dengan pelaksanaan webinar sosialisasi TKA kepada SMK untuk memperkuat pemahaman kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan tes. Selanjutnya, pendampingan dilakukan pada tahap persiapan melalui fasilitasi pendaftaran satuan pendidikan dan peserta, pelaksanaan try out dan simulasi TKA, serta pengawalan teknis pada saat pelaksanaan tes. Rangkaian pendampingan tersebut dilaksanakan untuk memastikan TKA berjalan secara tertib, sesuai pedoman, dan mendukung pemanfaatannya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

e. Pendampingan Revitalisasi

Pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, salah satunya melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Program Digitalisasi Pembelajaran sebagai program prioritas nasional. Kedua program ini menegaskan bahwa pendidikan berkualitas

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang layak serta pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Revitalisasi satuan pendidikan berperan strategis dalam memastikan tersedianya fasilitas pembelajaran, bengkel praktik, dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sementara itu, digitalisasi pembelajaran memperkuat proses pembelajaran vokasi melalui pemanfaatan teknologi, sumber belajar digital, dan pembelajaran berbasis praktik yang relevan dengan tuntutan kompetensi kerja masa depan. Sinergi kedua program tersebut menjadi fondasi transformasi pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai program prioritas nasional, BBPPMPV BMTI berperan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pendampingan, penguatan kapasitas, dan penjaminan mutu pendidikan vokasi, khususnya pada jenjang SMK. Peran pendampingan tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, pendampingan implementasi pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan tata kelola sarana dan prasarana pembelajaran vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui peran tersebut, BBPPMPV BMTI berkontribusi dalam memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di SMK tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan teknologi, tetapi juga diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, kualitas proses pembelajaran, serta keberlanjutan implementasi program.

a. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Target jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan bersama mitra dunia kerja di BBPPMPV BMTI pada periode tahun 2020–2024 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Per Tahun					Total Capaian
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	1		2	2	4	9
2.	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja				22	20	42

Indikator Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja menunjukkan perkembangan bertahap selama periode 2020–2024 dengan total capaian 9 inovasi model pembelajaran. Inovasi mulai tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1 model, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing 2 model, serta mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebanyak 4 model. Tren ini menunjukkan adanya penguatan kolaborasi dengan dunia kerja dalam pengembangan model pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan industri.

Sementara itu, indikator jumlah satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja mulai terealisasi pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 22 dan 20 satuan pendidikan, sehingga total mencapai 42 satuan pendidikan. Hal ini mencerminkan bahwa kemitraan mulai terstruktur dan terdokumentasi secara lebih sistematis pada dua tahun terakhir periode Renstra.

2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri

a. Predikat Capaian Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Selama periode Rencana Strategis 2020–2024, BBPPMPV BMTI secara konsisten menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kerangka utama dalam pengelolaan kinerja organisasi. Penerapan SAKIP ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja, sehingga mendorong pencapaian hasil yang efektif dan akuntabel.

Hasil evaluasi SAKIP pada periode tersebut menunjukkan capaian nilai yang stabil pada kategori baik dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini mencerminkan penguatan kualitas perencanaan kinerja, meningkatnya keselarasan antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan, serta semakin tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan BBPPMPV BMTI. Capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis BBPPMPV BMTI Tahun 2025–2029.

Capaian nilai SAKIP BBPPMPV BMTI pada tahun 2020 dan 2024, beserta uraian komponen penilaiannya, disajikan sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai SAKIP BBPPMPV BMTI
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Realisasi Capaian (Predikat)
1.	2020	BB (sangat baik)
2.	2021	BB (sangat baik)
3.	2022	BB (sangat baik)
4.	2023	A (memuaskan)
5.	2024	AA (sangat memuaskan)

Mulai tahun 2024 hingga 2025, target capaian nilai SAKIP diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Penetapan target tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta memastikan keterkaitan yang semakin kuat antara sasaran strategis, program, dan kegiatan.

f. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA -K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri

Indikator ini mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mencerminkan konsistensi antara perencanaan, realisasi, serta ketercapaian output kegiatan. Target minimal sebesar 93,5% menunjukkan komitmen BBPPMPV BMTI dalam menjaga pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2023, nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV BMTI tercatat sebesar **92,66%**. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi **97,42%**, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian anggaran yang semakin optimal dalam mendukung pencapaian sasaran balai secara keseluruhan.

3. Capaian Reformasi Birokrasi melalui Predikat WBBM

Setelah meraih predikat *Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)* pada tahun 2018, BBPPMPV BMTI terus berkomitmen melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang berorientasi pada integritas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Upaya konsisten ini mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan diraihnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan lembaga dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berfokus pada hasil dan dampak layanan. Lebih

dari sekadar penghargaan, WBBM merupakan refleksi dari transformasi sistem dan budaya kerja yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.



Gambar saat BBPPMPV BMTI meraih penghargaan WBBM dari Kemenpan-RB

Memasuki periode Renstra 2025–2029, BBPPMPV BMTI menempatkan capaian WBBM sebagai landasan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Fokus pengembangan diarahkan pada konsolidasi tata kelola yang adaptif, efisien, dan inovatif melalui penguatan manajemen berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang berintegritas serta kompeten.

BBPPMPV BMTI bertekad mempertahankan predikat WBBM melalui pembentukan sistem kerja yang berorientasi hasil (*result-based management*), penguatan budaya pelayanan prima, serta inovasi layanan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, semangat WBBM tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi menjadi identitas kelembagaan dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani secara berkelanjutan.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sejalan dengan tren persepsi publik yang semakin positif terhadap pendidikan vokasi, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan BBPPMPV BMTI menunjukkan capaian kinerja pelayanan yang konsisten dari tahun ke tahun. SKM dilaksanakan secara periodik dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2023, hasil SKM menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,79 dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik). Penilaian tersebut mencerminkan kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, baik layanan akademik maupun non-akademik.

Selanjutnya, pada Tahun 2024, hasil pengolahan SKM menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dengan nilai IKM sebesar 92,110 (konversi skala 0–100) yang berada pada kategori A (Sangat Baik). Hampir seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai rata-rata yang tinggi, khususnya pada aspek penanganan pengaduan, kesesuaian biaya atau tarif layanan, serta kecepatan pelayanan. Capaian ini menunjukkan adanya efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh BBPPMPV BMTI dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, hasil SKM menunjukkan nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 3,483 dengan mutu pelayanan B (Baik). Meskipun terjadi penurunan nilai dibandingkan periode sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa kinerja pelayanan BBPPMPV BMTI berada pada kategori baik dan masih terkendali.



Gambar hasil survey IKM Tahun 2023



Gambar hasil survey IKM Tahun 2024



Gambar hasil survey IKM tahun 2025

4.2 Isu Pendidikan Vokasi di Balai

- **Penguatan Kompetensi Pendidik Vokasi dalam Mendukung *Green Jobs***

Transformasi pembangunan nasional menuju ekonomi hijau mendorong meningkatnya kebutuhan *green jobs*, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Arah kebijakan ini menuntut sistem pendidikan vokasi untuk beradaptasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis sekaligus wawasan keberlanjutan. Pada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, konstruksi, energi, dan jasa pendukung industri, penguasaan *green skills* menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan.

Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya SMK integrasi konsep *green jobs* ke dalam pembelajaran masih belum diterapkan secara merata. Pembelajaran vokasi pada umumnya masih berfokus pada kompetensi teknis konvensional, sementara penerapan prinsip industri hijau, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas pendidik vokasi agar mampu mengadaptasi materi, metode, dan praktik pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan industri berkelanjutan.

BBPPMPV BMTI sebagai balai pengembangan dan pendampingan pendidik vokasi berperan dalam memperkuat kompetensi pendidik SMK agar mampu mengimplementasikan pembelajaran vokasi yang berwawasan lingkungan. Melalui layanan peningkatan kompetensi dan pendampingan, BBPPMPV BMTI mendukung pengintegrasian konsep *green jobs* dalam pembelajaran vokasi, sehingga lulusan SMK memiliki kesiapan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, adaptif terhadap perubahan industri, serta mendukung arah pembangunan berkelanjutan.

- **Peningkatan Kualitas Layanan Pendampingan Pendidikan Vokasi SMK**

Tenaga pendidik vokasi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan dinamika dunia kerja dan industri. Pendidikan vokasi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis terstandar, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Namun demikian, perubahan teknologi yang cepat dan tuntutan industri yang semakin kompleks menuntut pendidik vokasi untuk terus memperbarui kompetensi, baik melalui

peningkatan penguasaan teknis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, maupun penguatan metode pembelajaran berbasis praktik.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran vokasi di SMK masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan kompetensi pendidik terhadap perkembangan teknologi industri, keterbatasan pengalaman industri pendidik, serta variasi kualitas pembelajaran praktik antar satuan pendidikan. Pembelajaran masih cenderung bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pembelajaran yang kontekstual, berbasis proyek, dan selaras dengan kebutuhan industri. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan yang berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi, khususnya melalui penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

BBPPMPV BMTI sebagai balai pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pendampingan pendidikan vokasi SMK. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan kemitraan dengan dunia industri, BBPPMPV BMTI mendukung peningkatan kompetensi pendidik agar mampu menerapkan pembelajaran vokasi yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Peningkatan kualitas layanan pendampingan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pendidikan vokasi SMK mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan berdaya saing.

- **Penguatan Literasi Global dalam Pembelajaran Pendidikan Vokasi SMK**

Hasil asesmen internasional, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA), menunjukkan adanya tantangan serius pada capaian literasi peserta didik Indonesia, khususnya pada kemampuan membaca, numerasi, dan pemecahan masalah. Kondisi ini diperparah oleh terjadinya *learning loss* akibat pandemi yang berdampak pada menurunnya capaian pembelajaran secara signifikan. Meskipun pendidikan vokasi memiliki karakteristik pembelajaran berbasis praktik, kemampuan literasi dasar dan literasi global tetap menjadi fondasi penting bagi peserta didik dalam memahami instruksi kerja, standar industri, serta perkembangan teknologi dan informasi global.

Dalam konteks pendidikan vokasi SMK, literasi global tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan akademik dasar, tetapi juga mencakup kemampuan memahami konteks global dunia kerja, standar kompetensi internasional, serta perkembangan teknologi dan industri di tingkat global. Pada kondisi saat ini, penguatan literasi global dalam pembelajaran vokasi masih belum terintegrasi secara optimal. Pembelajaran praktik di SMK sering kali belum sepenuhnya didukung oleh penguatan literasi yang memadai, sehingga berdampak pada

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep, membaca data teknis, serta menerapkan pengetahuan secara komprehensif dalam konteks kerja.

BBPPMPV BMTI melaksanakan fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan coaching sebagai upaya perbaikan mutu pendidikan vokasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu, menyusun langkah perbaikan yang terarah, serta mengimplementasikan strategi pembelajaran dan tata kelola yang lebih efektif. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, pendampingan dan coaching diharapkan mampu mendorong perubahan praktik pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan sehingga berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan pendidikan

- **Penguatan Literasi Digital melalui Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) pada Pendidikan Vokasi SMK**

Perkembangan teknologi digital, khususnya koding dan Kecerdasan Artifisial (KA), telah menjadi bagian penting dalam transformasi dunia kerja dan industri. Pendidikan vokasi SMK dituntut untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, integrasi koding dan KA ke dalam pembelajaran vokasi masih menghadapi tantangan, terutama pada kesiapan pendidik dalam memahami konsep dasar, penerapan kontekstual sesuai bidang keahlian, serta pemanfaatan teknologi digital secara bermakna dalam proses pembelajaran berbasis praktik.

Sebagai UPT di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, BBPPMPV BMTI menghadapi kebutuhan untuk memperkuat literasi digital pendidik SMK melalui pendekatan koding dan KA yang relevan dengan karakteristik pendidikan vokasi. Pendidik vokasi tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga memahami logika pemrograman, pengolahan dan analisis data sederhana, serta pemanfaatan KA dalam pembelajaran dan proses industri. Kesenjangan kompetensi pendidik, keterbatasan akses terhadap pelatihan yang aplikatif, serta belum optimalnya integrasi koding dan KA ke dalam pembelajaran kejuruan menjadi kondisi nyata yang perlu direspon secara sistematis oleh BBPPMPV BMTI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPPMPV BMTI berperan sebagai pendamping strategis dalam penguatan kompetensi pendidik vokasi terkait koding dan KA. Melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan model pembelajaran, BBPPMPV BMTI mendorong integrasi koding dan KA ke dalam pembelajaran SMK yang sesuai

dengan kebutuhan industri dan karakteristik bidang keahlian. Pendekatan ini diarahkan agar pendidik vokasi mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan etis, sehingga lulusan SMK memiliki kesiapan menghadapi dunia kerja digital secara adaptif dan berkelanjutan.

4.3 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Secara umum, kondisi BBPPMPV BMTI memiliki posisi sangat strategis dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai, serta dengan komitmen pimpinan dan seluruh karyawan yang tinggi, maka guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional di bidangnya dan perbaikan mutu pendidikan vokasi dapat diwujudkan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi Pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan berbasis teknologi dan industri

BBPPMPV BMTI memiliki sarana dan prasarana pelatihan berupa workshop, laboratorium, serta peralatan praktik yang dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi pendidik vokasi, khususnya pada bidang teknik, manufaktur, otomasi, dan teknologi industri. Fasilitas tersebut digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pelatihan berbasis praktik, simulasi proses kerja industri, serta pengenalan teknologi dan peralatan yang relevan dengan pembelajaran kejuruan di SMK. (STANDAR SARANA PRASARANA DIUKUR JUGA SEBAGAI PEMBANDING ANTARA STANDAR SEKOLAH DAN STANDAR INDUSTRI)

Ketersediaan sarana praktik ini memungkinkan pendidik SMK memperoleh pengalaman belajar yang mendekati kondisi kerja di industri, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat teoritis tetapi menekankan penguasaan keterampilan teknis. Meskipun diperlukan pemutakhiran secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi industri, sarana dan prasarana yang dimiliki BBPPMPV BMTI tetap menjadi potensi penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan pendidik vokasi secara berkelanjutan.

2. Sumber daya manusia dengan latar belakang teknis vokasi

BBPPMPV BMTI didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki latar belakang teknis vokasi, terdiri atas widyaiswara yang berperan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan serta pendampingan bagi pendidik SMK. Widyaiswara menjadi

ujung tombak dalam transfer kompetensi, pengembangan materi pelatihan, serta penerapan pembelajaran berbasis praktik sesuai kebutuhan kejuruan dan perkembangan teknologi industri.

Selain widyaiswara, BBPPMPV BMTI juga didukung oleh jabatan fungsional dan pelaksana lainnya yang berperan sebagai pendukung operasional, administratif, dan teknis pelatihan. Keberadaan SDM pendukung ini menjadi potensi penting dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan, sehingga layanan peningkatan kompetensi pendidik vokasi dapat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan

3. Akses dan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)

BBPPMPV BMTI memiliki akses dan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendidik vokasi. Kemitraan tersebut terwujud dalam keterlibatan praktisi industri sebagai narasumber, pemanfaatan industri sebagai referensi standar kerja, serta dukungan pemutakhiran materi pelatihan agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di dunia kerja.

Jejaring kemitraan yang dimiliki BBPPMPV BMTI bersifat fungsional dan operasional, meskipun belum merata pada seluruh bidang keahlian. Kondisi ini menjadi potensi nyata bagi BBPPMPV BMTI untuk terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan vokasi dan praktik industri, khususnya dalam meningkatkan relevansi kompetensi pendidik SMK terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri.

4. Jangkauan layanan langsung kepada SMK dan pendidik vokasi

BBPPMPV BMTI memiliki jangkauan layanan langsung kepada SMK dan pendidik vokasi melalui pelaksanaan pelatihan, dan pendampingan yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Interaksi langsung dengan satuan pendidikan dan pendidik vokasi ini menjadi potensi penting dalam memahami kebutuhan riil di lapangan, baik terkait kompetensi pendidik, implementasi pembelajaran kejuruan, maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan vokasi.

Jangkauan layanan tersebut menempatkan BBPPMPV BMTI sebagai pelaksana teknis kebijakan yang berinteraksi langsung dengan SMK dan pendidik vokasi. Hubungan yang terbangun melalui pelatihan dan pendampingan menjadi potensi awal bagi BBPPMPV BMTI untuk memahami kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik serta variasi kondisi satuan pendidikan di lapangan.

Melalui jangkauan layanan ini, BBPPMPV BMTI memiliki peluang untuk memperkuat peran sebagai rujukan peningkatan kompetensi pendidik vokasi secara bertahap. Pemanfaatan umpan balik dari SMK dan pendidik vokasi menjadi dasar dalam mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.

b. Permasalahan

1. Keterbatasan data kebutuhan kompetensi industri yang mutakhir dan terintegrasi, sehingga penyelarasan program peningkatan kompetensi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sangat berdampak terhadap pola pelatihan yang dilaksanakan.
2. Belum meratanya kapasitas satuan pendidikan dalam menindaklanjuti hasil pemetaan mutu, keterbatasan pendampingan, perbedaan kesiapan sarana prasarana, serta keterbatasan SDM pengelola mutu di satuan pendidikan menyebabkan peningkatan mutu belum dapat dicapai secara optimal dan merata.
3. Keterbatasan mitra dunia kerja yang dapat terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat perbedaan kebutuhan industri dengan kondisi dan kurikulum satuan pendidikan, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses uji coba dan implementasi model pembelajaran di sekolah.
4. Adanya perubahan kebijakan dan penyesuaian tata kelola organisasi seiring perubahan nomenklatur kementerian, yang memerlukan adaptasi terhadap sistem perencanaan program dan anggaran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Dalam menyusun rencana strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI), menyelaraskan kerangka kerja dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus untuk periode 2025-2029. Visi yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

”Terwujudnya pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik industri yang bermutu, relevan dengan kebutuhan industri, adaptif terhadap transformasi teknologi, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan nilai dan budaya kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH). Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan BBPPMPV BMTI dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas, serta mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia sesuai dengan visi dan misi presiden.

2.2. Misi

Sebagai wujud nyata dalam mendukung pencapaian visi tersebut, BBPPMPV BMTI melaksanakan tugas dan fungsinya selaras dengan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlandaskan pada pelaksanaan Misi Asta Cita Presiden. Adapun Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sistem pembelajaran yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi;

2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan; dan
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, serta peran seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Sejalan dengan Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dalam menjalankan mandatnya BBPPMPV BMTI secara spesifik berperan langsung dalam mendukung **Misi pertama dan Misi ketiga** Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik industri melalui penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
3. Memperkuat penjaminan mutu dan pengembangan model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja.
4. Mengoptimalkan kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis BBPPMPV BMTI Tahun 2025–2029 sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Perumusan tujuan dan sasaran strategis ini didasarkan pada tujuan dan sasaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan direktorat jenderal, dan implementasi teknis di tingkat balai.

2.3. Tujuan

BBPPMPV BMTI telah menetapkan dua tujuan strategis yang dirumuskan dengan berpedoman pada tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029. Penetapan tujuan strategis tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI sebagai Unit Pelaksana Teknis, sekaligus sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan serta penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik.

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BBPPMPV BMTI

Tahun 2025-2029

TUJUAN BBPPMPV BMTI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BBPPMPV BMTI	Target
SK.1 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	• Presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	10.746 orang
	• Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	4.072 lembaga
	• Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	24 model
Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	• Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik
	• Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri minimal A	AA

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan BBPPMPV BMTI berawal dari pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan diturunkan pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PK dan PLK. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan target yang jelas sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau dari tahun ke tahun serta selaras dengan arah kebijakan nasional pendidikan

vokasi. Terjemahan sasaran strategis Ditjen Diksi PKPLK yang dapat diturunkan sebagai sasaran kegiatan BBPPMPV BMTI adalah tujuan Keempat dan Kelima sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis Ditjen Vokasi, PKPLK	Sasaran Kegiatan BBPPMPV BMTI
1.	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
2.	Meningkatnya tata kelola Diksi PKPLK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri

Berdasarkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, BBPPMPV BMTI mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi tingkat ketercapaian Sasaran Kegiatan BBPPMPV BMTI. Oleh karena itu, indikasi risiko yang mungkin muncul disajikan sebagai berikut.

Tabel Indikasi Risiko pada Ketercapaian Sasaran Kegiatan BBPPMPV BMTI

SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO
SK. 1 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	1. Sebagian peralatan bengkel/laboratorium belum sepenuhnya mengikuti teknologi industri terbaru 2. Keterbatasan pagu anggaran tahunan berdampak pada jumlah peserta pelatihan, durasi kegiatan, serta keterbatasan pengembangan model inovasi pembelajaran. 3. Sebagian peserta pelatihan memiliki kesiapan awal yang berbeda-beda, baik dari sisi kompetensi dasar maupun literasi digital, sehingga efektivitas pelatihan tidak seragam. 4. Monitoring pascapelatihan telah dilaksanakan, namun masih perlu penyempurnaan dalam penetapan dan pengukuran target implementasi rencana tindak lanjut peserta agar dampaknya lebih terukur. 5. Perubahan kebijakan pusat yang cepat (kurikulum, AN, TKA, digitalisasi, green skills)

SK. 2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	1. Sinkronisasi antara perencanaan program, realisasi kegiatan, dan pelaporan kinerja belum selalu optimal, terutama ketika terjadi revisi anggaran di tengah tahun. 2. Pengawasan internal dan manajemen risiko belum terdokumentasi secara sistematis dalam seluruh unit kerja. 3. Percepatan realisasi anggaran di akhir tahun berisiko memengaruhi optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan. 4. Belum optimalnya pemanfaatan proses bisnis sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kegiatan berisiko menyebabkan ketidakterpaduan pelaksanaan program serta kurang efektifnya pencapaian target kinerja.
---	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMN tersebut, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK). Sejalan dengan mekanisme tersebut, arah kebijakan strategis BBPPMPV BMTI disusun sebagai turunan dari sasaran kegiatan Ditjen Diksi PKPLK guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.

Delapan agenda prioritas nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Secara spesifik, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

1. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
2. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK) menempatkan seluruh arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pada **Prioritas Nasional 4**, yaitu penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran kelompok strategis, seperti penyandang disabilitas, anak usia sekolah kejuruan, pemuda, dan perempuan. Intervensi ini sejalan dengan mandat utama Ditjen Diksi PKPLK dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan nonformal dan informal. Oleh karena itu, kontribusi Ditjen Diksi PKPLK difokuskan pada pengembangan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, tanpa melakukan intervensi langsung pada prioritas nasional lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah);

2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
3. Penguatan sistem tata kelola pendidikan; dan
4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja.

Untuk itu, dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen dirumuskan secara sistematis ke dalam program-program Ditjen Vokasi PKPLK, yang kemudian selaras dilaksanakan oleh BBPPMPV BMTI melalui Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan BBPPMPV BMTI

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN	SASARAN KEGIATAN DITJEN DIKSI, PKPLK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BBPPMPV BMTI
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, & Penyandang Disabilitas		
Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	SK. 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	1.1. Presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja
		1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya
		1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi
	SK. 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2.1. Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dengan kategori

	Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Sangat Baik
		2.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri minimal A

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPPMPV BMTI

Dalam periode perencanaan Tahun 2025–2029, BBPPMPV BMTI menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai turunan dari kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK). Perumusan arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, agenda Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun arah kebijakan BBPPMPV BMTI difokuskan pada dua hal utama, yaitu: (1) meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, serta (2) meningkatnya tata kelola BBPPMPV BMTI. Kedua arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan BBPPMPV BMTI untuk mendukung penguatan penjaminan mutu pendidikan vokasi.

1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

Dalam mendukung peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran pendidikan vokasi sebagaimana arah kebijakan Ditjen Diksi PKPLK, BBPPMPV BMTI memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada penguatan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPPMPV BMTI menerapkan strategi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran vokasi melalui:

1. Pengembangan dan pendampingan model pembelajaran berstandar industri, seperti *teaching factory* dan pengembangan unit usaha di SMK, serta pendampingan rintisan kewirausahaan bersama industri di LKP agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan kerja yang relevan dengan bidang keahliannya.
2. Fasilitasi pengembangan kurikulum berbasis dunia kerja dan masyarakat untuk memastikan keselarasan pembelajaran dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja.
3. Penguatan pembelajaran mendalam yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta penguasaan keterampilan praktis di bidang kejuruan.
4. Pengembangan pembelajaran informatika, koding, dan kecerdasan artifisial guna meningkatkan keterampilan digital pendidik dan peserta didik sesuai perkembangan teknologi.
5. Penyediaan dan pemanfaatan model pembelajaran fleksibel, termasuk pendidikan jarak jauh (PJJ), untuk memperluas akses layanan pembelajaran vokasi yang relevan di berbagai wilayah.
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui penyediaan perangkat dan konten digital yang mendukung pembelajaran interaktif dan adaptif.
7. Penguatan pembelajaran yang menekankan pembentukan karakter, pengembangan psikososial, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman melalui pendampingan pendidikan karakter dan peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling serta guru agama.
8. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam melalui penerapan dimensi Profil Lulusan yang mencakup aspek keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan komunikasi.
9. Penyelenggaraan program *upskilling* dan *reskilling* bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi industri dan metodologi pembelajaran terbaru.

2. Peningkatan tata kelola di BBPPMPV BMTI.

Penguatan tata kelola BBPPMPV BMTI diarahkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan balai berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan orientasi pada hasil kinerja. Fokus penguatan tata kelola mencakup pengelolaan kelembagaan layanan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang mesin dan teknik, serta peningkatan kualitas manajemen layanan dan kinerja balai guna membangun sistem organisasi yang berintegritas dan berdaya saing. Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan BBPPMPV BMTI secara berkelanjutan serta selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola balai yang optimal, BBPPMPV BMTI melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan ekosistem pendidikan vokasi, melalui peningkatan sinergi antara BBPPMPV BMTI, satuan pendidikan vokasi, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pelaksanaan program penjaminan mutu.
2. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan layanan.
3. Penguatan manajemen layanan kerja sama dengan dunia industri, guna memastikan kemitraan yang terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi.
4. Penguatan manajemen layanan dan kinerja balai, untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta pelayanan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH).

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029, BBPPMPV BMTI perlu memperkuat kerangka regulasi internal sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi. Regulasi yang disusun diarahkan pada penguatan tata kelola, peningkatan mutu layanan pelatihan, penguatan penjaminan mutu, serta optimalisasi kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Berikut rencana regulasi yang akan disusun dan/atau disempurnakan selama periode Renstra:

No	Regulasi yang Disusun/Disempurnakan	Tujuan	Waktu Penyelesaian	PIC (Penanggung Jawab)
1.	Revisi dan Standarisasi SOP Layanan Pelatihan	Meningkatkan kualitas, kejelasan alur, dan standar layanan pelatihan berbasis kompetensi	2025	Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama
2.	SOP Pendampingan Penjaminan Mutu (Tracer Study, AN, TKA)	Menyeragamkan mekanisme pendampingan satuan pendidikan vokasi	2025	Tim Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
3.	Pedoman Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Dunia Kerja	Menjadi acuan teknis pengembangan dan replikasi model pembelajaran	2026	Tim Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
4.	SOP Pengelolaan Kemitraan dengan DUDIKA	Mengatur tata cara inisiasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi kemitraan	2026	Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama
5.	SOP Pemanfaatan dan Pemutakhiran Sarana Praktik	Mengoptimalkan penggunaan workshop/lab serta perencanaan upgrade peralatan	2026	Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
6.	Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Digital/Blended Learning	Mengatur standar pelaksanaan pelatihan daring dan hybrid	2027	Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama

7.	SOP Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Memastikan tindak lanjut dan dampak pelatihan terhadap pembelajaran di SMK	2027	Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama
8.	SOP Pengelolaan TUK dan Sertifikasi Kompetensi	Menjamin konsistensi pelaksanaan uji kompetensi sesuai standar BNSP	2025	Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama
9.	Penyempurnaan SOP Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	Mendukung pencapaian IKPA minimal 93,5 dan SAKIP AA	2025	Bagian Perencanaan dan Penganggaran
10.	Pedoman Integrasi Green Skills dan Transformasi Digital dalam Pelatihan	Menyesuaikan pelatihan dengan isu green jobs dan digitalisasi	2028	Program Pengajaran Umum dan Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kerjasama

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BBPPMPV BMTI yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk:

1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV BMTI;
2. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur.

Mandat Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 167/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi telah dijalankan melalui berbagai program dan layanan pengembangan serta penjaminan mutu pendidikan vokasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPPMPV BMTI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;

2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia insdustri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.

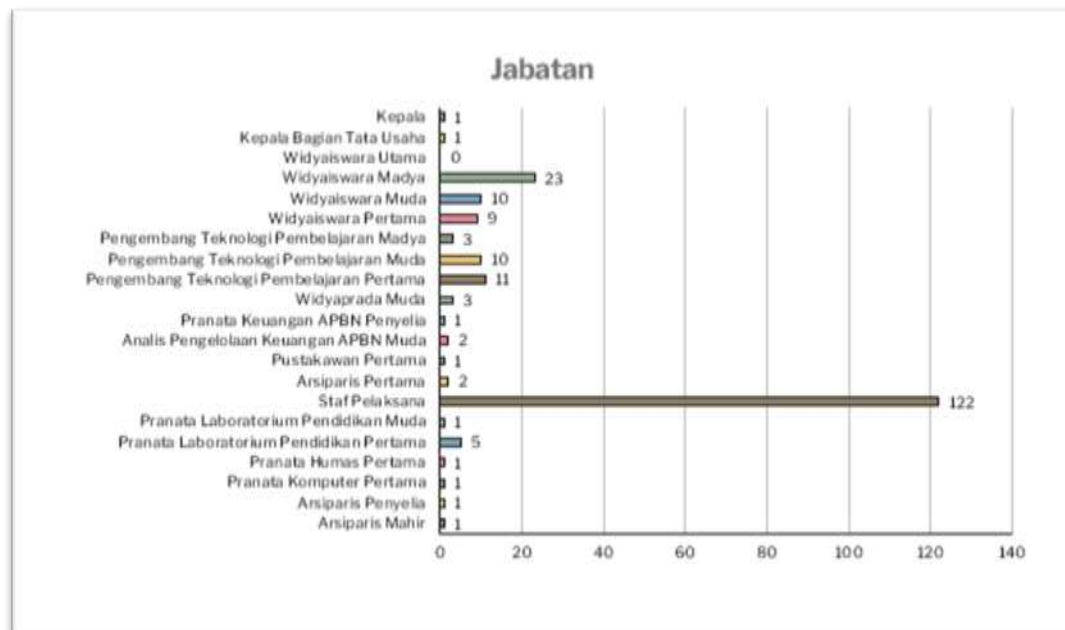
BBPPMPV BMTI didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang keahlian yang beragam, mencakup bidang teknis, manajerial, dan administratif. Keberagaman kompetensi tersebut menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPMPV BMTI sebagai unit pelaksana teknis pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBPPMPV BMTI sebanyak 221 orang, yang terdiri atas Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai tersebut disusun untuk memastikan keberlangsungan layanan, efektivitas pelaksanaan program, serta pemenuhan kebutuhan operasional balai secara optimal.

Sebaran pegawai BBPPMPV BMTI berdasarkan jenis jabatan dan tingkat pendidikan disajikan secara rinci dalam tabel berikut, yang menggambarkan proporsi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik layanan pendidikan vokasi.

Jabatan	Jumlah
Kepala	1
Kepala Bagian Tata Usaha	1
Widyaiswara Utama	0
Widyaiswara Madya	23
Widyaiswara Muda	10
Widyaiswara Pertama	9
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	3
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	11
Widyaprada Muda	3
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	2
Pustakawan Pertama	1
Arsiparis Pertama	2
Staf Pelaksana	122
Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	1
Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	5
Pranata Humas Pertama	1
Pranata Komputer Pertama	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Mahir	1
Perencana Pertama	1
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	11
Grand Total	221

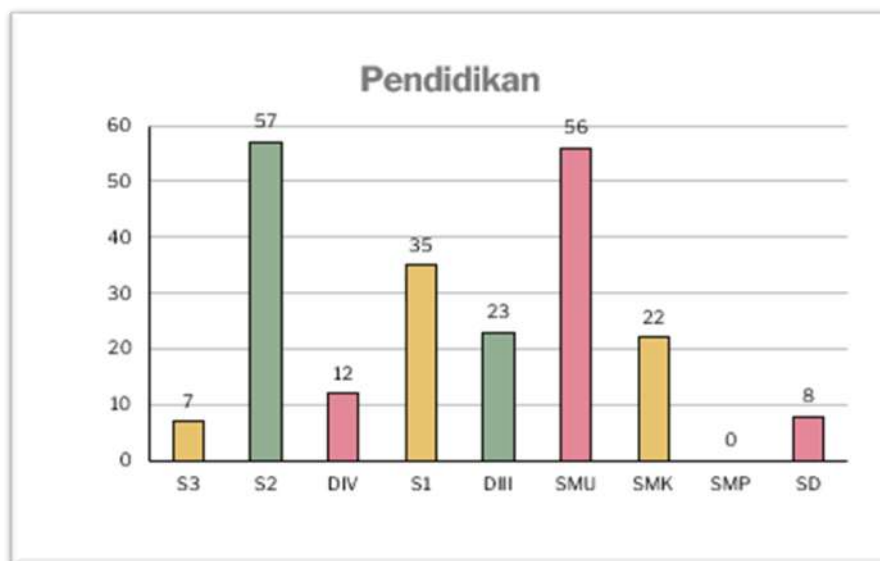
Gambar Tabel pegawai BBPPMPV BMTI berdasarkan jabatan



Grafik pegawai berdasarkan jabatan

Pendidikan	Jumlah
S3	7
S2	57
DIV	12
S1	35
DIII	23
SMU	56
SMK	22
SMP	0
SD	8
UP. Paket C	0
Profesi	1
Grand Total	221

Gambar tabel pegawai berdasarkan jenjang pendidikan



Gambar grafik pegawai BBPPMPV BMTI berdasarkan jenjang pendidikan

Selain sumber daya manusia, BBPPMPV BMTI memiliki lingkup sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik vokasi. Aset tersebut berada dalam satu kawasan dengan luas kurang lebih 14 ha, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan, pembelajaran, pendampingan, serta kegiatan penunjang operasional dan layanan balai. Luas kawasan ini menjadi modal penting dalam penyelenggaraan layanan pelatihan vokasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sarana pelatihan yang dimiliki BBPPMPV BMTI meliputi ruang kelas pembelajaran, bengkel, dan laboratorium yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan berbasis teori dan praktik. Fasilitas tersebut mendukung proses pembelajaran kejuruan, simulasi kerja industri, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Selain itu, tersedia pula gedung aula yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertemuan, serta kegiatan penunjang pelatihan dan koordinasi.

Sebagai bagian dari lingkup aset balai, BBPPMPV BMTI juga memiliki sarana pendukung dan fasilitas penunjang, antara lain ruang olahraga berupa gym, lapangan tenis, kolam renang, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, tenis meja, serta *jogging track*. Fasilitas pendukung lainnya mencakup ruang makan bersama (Bale Raos) yang menunjang aktivitas harian peserta, serta ruang ibadah mesjid yang terletak di dalam area kantor. Keseluruhan aset tersebut berperan dalam menciptakan lingkungan pelatihan yang kondusif, terpadu, dan mendukung keberlangsungan penyelenggaraan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi di BBPPMPV BMTI.



Gambar sarana dan prasarana di BBPPMPV BMTI

Selama kurun waktu tahun 2020–2024, BBPPMPV BMTI telah melaksanakan berbagai program pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mencakup beragam program keahlian sesuai bidang tugas balai. Program

pelatihan tersebut dirancang berbasis Gradual Competency Development dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan vokasi serta karakteristik industri pada masing-masing bidang keahlian.

Adapun program keahlian pelatihan yang diselenggarakan di BBPPMPV BMTI meliputi:

1. Teknik Permesinan
2. Teknik Las dan Fabrikasi Logam
3. Teknik Ketenagalistrikan
4. Teknik Elektronika dan Informatika
5. Teknik Otomotif
6. Teknik Sipil dan Perencanaan
7. Teknik Energi Terbarukan
8. Program Manajerial dalam Program Pengajaran Umum

Masing-masing program keahlian tersebut memiliki profil dan karakteristik layanan pelatihan yang disusun untuk menjawab kebutuhan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, baik dari aspek penguasaan teknologi, metode pembelajaran, maupun penguatan keterkaitan dengan dunia industri. Profil program keahlian di BBPPMPV BMTI mencerminkan kesiapan sarana prasarana, instruktur, kurikulum pelatihan, serta dukungan kemitraan industri yang dimiliki oleh Balai.

1. Program Keahlian Teknik Permesinan

Program Keahlian Teknik Permesinan difokuskan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi dalam penguasaan teknologi manufaktur dan proses produksi. Program keahlian ini melaksanakan kegiatan kajian, pengembangan, serta pemodelan sistem pelatihan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang keahlian teknik mesin.

Menjadi tempat : Uji Kompetensi (TUK) yang telah terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui lembaga Sertifikasi Profesi – Logam Mesin Indonesia (LSP-LMI) untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi bidang pemesinan, CNC, Perawatan dan Perbaikan serta Gambar Mesin.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Permesinan

3. Program Keahlian Teknik Las dan Fabrikasi Logam

Program Keahlian Las dan Fabrikasi Logam dirancang untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi sesuai dengan standar industri, khususnya pada bidang pengelasan dan fabrikasi logam. Program ini melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemodelan sistem pelatihan serta pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang keahlian las dan fabrikasi logam.

Materi pelatihan mencakup teknik pengelasan manual dan semi-otomatis, teknik fabrikasi struktur logam, serta penerapan prosedur kerja dan keselamatan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri konstruksi dan manufaktur logam. Program ini juga berperan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Logam Mesin Indonesia (LSP-LMI) untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian bidang las dan fabrikasi logam, termasuk perawatan dan perbaikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, Program Keahlian Las dan Fabrikasi Logam didukung oleh fasilitas bengkel las yang meliputi GTAW, GMAW, dan SMAW, serta sarana fabrikasi logam yang menunjang pembelajaran berbasis praktik dan standar kerja industri.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Las dan Fabrikasi Logam

3. Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan

Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan berfokus pada penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi di bidang instalasi, pengendalian, dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Program ini melaksanakan kegiatan kajian, pengembangan, serta pemodelan sistem pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang ketenagalistrikan, sejalan dengan regulasi, standar keselamatan kerja, dan perkembangan teknologi.

Pelatihan mencakup sistem tenaga listrik, instalasi listrik bangunan, pengendalian listrik industri dan otomasi, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan juga berperan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Otomasi Industri, didukung oleh trainer yang sekaligus berperan sebagai asesor dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi guru SMK dan tenaga kerja industri.

Dalam mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, program keahlian ini didukung oleh fasilitas laboratorium yang meliputi laboratorium dasar dan instalasi listrik, power electronic, power system, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), otomasi, DCS/SCADA, refrigerasi dan tata udara, serta laboratorium multimedia dan laboratorium latih untuk pemodelan dan pengukuran pembelajaran berbasis praktik.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan

4. Program Keahlian Teknik Elektronika dan Informatika

Program Keahlian Elektronika dan Informatika melaksanakan kegiatan pengembangan serta pemodelan sistem pelatihan dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada bidang elektronika dan teknologi informatika. Program keahlian ini menaungi program studi Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer, dan Informatika, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi berbasis perkembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran vokasi.

Cakupan pelatihan meliputi elektronika dasar dan terapan, sistem kontrol dan otomasi, serta pemanfaatan teknologi digital dan informatika dalam proses pembelajaran. Melalui pelatihan tersebut, Program Keahlian Elektronika dan Informatika mendukung transformasi digital pendidikan vokasi serta penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Elektronika dan Informatika

5. Program Keahlian Teknik Otomotif

Program Keahlian Teknik Otomotif melaksanakan kegiatan kajian, pengembangan, serta pemodelan sistem pelatihan dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada bidang keahlian otomotif. Program keahlian ini mencakup kompetensi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Ototronik, Teknik Otomotif, serta Teknik Alat Berat, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi sesuai karakteristik dan perkembangan teknologi kendaraan.

Materi pelatihan difokuskan pada perawatan dan perbaikan kendaraan, sistem mesin dan kelistrikan kendaraan, serta pengenalan dan penerapan teknologi otomotif terkini sesuai standar industri. Melalui pelaksanaan pelatihan tersebut, Program Keahlian Teknik Otomotif mendukung keselarasan pembelajaran otomotif di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta perkembangan teknologi kendaraan yang terus berkembang.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Otomotif

6. Program Keahlian Teknik Sipil dan Perencanaan

Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti melaksanakan kegiatan kajian dan pengembangan sistem pelatihan serta pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada bidang Teknik Sipil dan Perencanaan. Program ini diarahkan untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis dan pedagogis pendidik agar mampu menyelenggarakan pembelajaran kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan sektor konstruksi.

Program keahlian ini mencakup beberapa kompetensi keahlian, yaitu Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan; Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan; Bisnis Konstruksi dan Properti; serta Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pelaksanaan pelatihan meliputi teknik konstruksi, kegiatan pengukuran, perencanaan bangunan, serta penerapan standar keselamatan dan mutu kerja. Melalui program ini, diharapkan kemampuan pendidik vokasi dalam mengajarkan kompetensi konstruksi dan perencanaan bangunan dapat semakin meningkat dan selaras dengan kebutuhan sektor infrastruktur serta dunia usaha dan dunia industri.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Sipil dan Perencanaan

7. Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan

Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan melaksanakan kegiatan kajian, pengembangan, serta pemodelan sistem pelatihan dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada bidang energi terbarukan. Program ini diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas pendidik vokasi dalam mengajarkan teknologi energi ramah lingkungan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelatihan mencakup penguasaan sistem energi surya, energi angin, serta berbagai teknologi energi terbarukan lainnya. Dalam mendukung penjaminan mutu kompetensi, Departemen Teknik Energi Terbarukan juga menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga peserta memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku. Kegiatan pembelajaran didukung oleh ketersediaan fasilitas laboratorium, antara lain Laboratorium PLTS, PLTB, PLTM/PLTMH, Biogas, Biodiesel, Bioetanol, serta Gasifikasi/Pirolisis, yang memungkinkan pelaksanaan pelatihan berbasis praktik dan selaras dengan kebijakan transisi energi nasional serta penguatan kompetensi vokasi yang berorientasi pada keberlanjutan.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan

8. Program Pengajaran Umum

Program Pengajaran Umum memfasilitasi pengembangan kompetensi guru adaptif bersama kepala sekolah dan pengawas sekolah, khususnya dalam aspek pedagogik dan pengelolaan pembelajaran. Program manajerial difokuskan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan, yang mencakup pengembangan kurikulum, manajemen pembelajaran, asesmen, serta penguatan kompetensi pedagogik dan kepemimpinan. Guru adaptif, yang mengampu mata pelajaran penunjang kejuruan seperti matematika, sains terapan, bahasa dan mata pelajaran umum lainnya, memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi kompetensi peserta didik agar selaras dengan kebutuhan pembelajaran vokasi dan tuntutan dunia kerja.



Gambar aktivitas pelatihan di Program Pengajaran Umum

3.4.1. Struktur Organisasi BBPPMPV BMTI

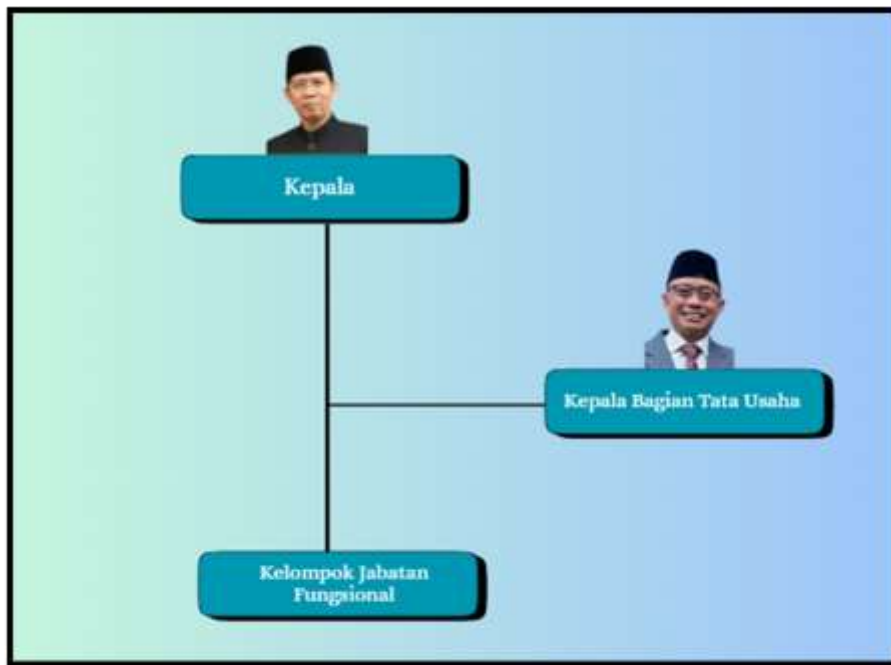
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi BBPPMPV BMTI terdiri atas Kepala, Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas di BBPPMPV BMTI.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BBPPMPV BMTI didukung oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi BBPPMPV BMTI



3.4.2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara BBPPMPV BMTI

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini, kondisi ASN di BBPPMPV BMTI berjumlah sebanyak **221 orang** yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

3.4.3. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029

Proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPPMPV BMTI Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi untuk memastikan pencapaian arah kebijakan dan sasaran strategis balai. Penyusunan proyeksi ini mempertimbangkan berbagai dinamika kepegawaian, antara lain jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun, serta tuntutan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan pada masing-masing unit kerja.

Melalui pendekatan tersebut, berikut disajikan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia BBPPMPV BMTI hingga Tahun 2029 yang selaras dengan proyeksi kebutuhan ASN di Diksi PKPLK:

Tabel Proyeksi Kebutuhan ASN BBPPMPV BMTI Tahun 2025-2029

NO	KEKURANGAN	KEBUTUHAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	-137	15	36	32	34	21	138

3.5. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan BBPPMPV BMTI dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PKPLK dan Kementerian Pendidikan secara keseluruhan. Reformasi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.

Melalui reformasi birokrasi, BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem manajemen kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Selaras dengan Ditjen Diksi PKPLK pada periode 2025-2029 dimensi utama Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di BBPPMPV BMTI secara khusus difokuskan pada dua aspek utama, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi Internal, yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur guna mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas dari praktik korupsi. Adapun pencapaian yang dilaksanakan oleh BBPPMPV BMTI dalam upaya mempertahankan predikat WBBM, yaitu:
 - a. Penyederhanaan dan standarisasi proses bisnis serta prosedur layanan.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 - c. Penguatan budaya kerja berintegritas dan pengawasan internal untuk mempertahankan predikat WBBM.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan serta survei kepuasan masyarakat secara berkala.
 - e. Penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berbasis hasil untuk menjaga nilai SAKIP.
 - f. Penguatan monitoring capaian kinerja dan cascading kinerja sampai level individu.
 - g. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan ketertiban administrasi guna mempertahankan nilai IKPA.
 - h. Peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang pelayanan, perencanaan, dan pengelolaan kinerja organisasi.
2. Dalam kerangka Reformasi Birokrasi Tematik, BBPPMPV BMTI menyusun kegiatan yang selaras dengan Program Prioritas Nasional melalui:
- a. pelaksanaan program PHTC berupa revitalisasi dan digitalisasi pendidikan vokasi yang diarahkan pada modernisasi layanan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan tata kelola pendidikan yang efektif dan berkelanjutan;
 - b. implementasi pembelajaran coding dan Kecerdasan Artifisial (KA) sebagai bagian dari penguatan literasi digital guna mendukung transformasi pembelajaran vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; serta
 - c. pendampingan penguatan literasi dan numerasi melalui fasilitasi dan coaching kepada satuan pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan capaian hasil belajar peserta didik secara terukur.

Melalui implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan, BBPPMPV BMTI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis pendidikan vokasi nasional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PKPLK serta memastikan dukungan nyata terhadap kebijakan nasional pendidikan vokasi, BBPPMPV BMTI menetapkan target kinerja sebagai kondisi hasil (outcome) yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Target kinerja ini disusun sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja BBPPMPV BMTI, yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai pengukuran level hasil, serta Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai pengukuran level keluaran.

Setiap indikator kinerja ditetapkan dengan definisi operasional, baseline, target, sumber data, serta frekuensi pemantauan yang jelas sehingga dapat digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, kontrak kinerja, serta evaluasi SAKIP secara transparan dan akuntabel. Sasaran strategis Ditjen Diksi PKPLK yang diturunkan menjadi sasaran kegiatan BBPPMPV BMTI adalah Keempat dan Kelima.

a. Sasaran Kegiatan 1 (SK.1.) meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

Sasaran Kegiatan 1 (SK.1.) diarahkan pada meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan vokasi yang diselenggarakan oleh BBPPMPV BMTI. Peningkatan mutu ini tidak hanya tercermin dari kualitas proses pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, tetapi juga dari meningkatnya kompetensi peserta secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan program pelatihan yang terstandar, adaptif, dan berbasis kebutuhan industri, SK.1. diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan vokasi. Dampak tersebut antara lain berupa meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola pembelajaran, penguatan keterampilan teknis dan pedagogis, serta kontribusi langsung terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan vokasi yang lebih kompeten dan siap kerja.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Mutu Pendidikan dan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Vokasi

SK.1.	meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK. 1.1.	Presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%		29,07%	38,10%	47,13%	56,16%	65,19%
IKK. 1.2.	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga		472	643	814	986	1.157
IKK. 1.3.	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Model		2	4	5	6	7

Sasaran Kegiatan 1 (SK.1.) berfokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan vokasi yang berdampak langsung pada kualitas satuan pendidikan vokasi. Capaian sasaran ini diukur melalui tiga indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi selaras dengan kebutuhan dunia kerja, jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengalami peningkatan mutu, serta jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama dengan mitra dunia kerja yang diterapkan.

Ketiga indikator tersebut menunjukkan pendekatan peningkatan mutu yang bersifat komprehensif, mencakup penguatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan kualitas kelembagaan pendidikan vokasi, serta inovasi pembelajaran berbasis kemitraan industri. Melalui pencapaian indikator-indikator ini secara bertahap hingga tahun 2029, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta berdampak pada peningkatan kompetensi lulusan secara berkelanjutan.

b. Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) meningkatnya tata kelola BBPPMPV BMTI.

Sasaran Kegiatan 2 (SK.2.) diarahkan pada meningkatnya tata kelola BBPPMPV BMTI yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi. Peningkatan tata kelola ini mencakup penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, serta akuntabilitas kinerja kelembagaan.

Melalui penerapan prinsip good governance, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan internal, SK.2. diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis BBPPMPV BMTI secara berkelanjutan.

SK.2.	Meningkatnya tata kelola BBPPMPV BMTI	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK. 2.1.	Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dengan kategori Sangat Baik	Predikat		A	AA	AA	AA	AA
IKK. 2.2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri minimal A	Predikat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran strategis BBPPMPV BMTI periode 2025–2029, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dukungan pendanaan tersebut mencakup pembiayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelatihan, sistem informasi pendukung layanan, serta pelaksanaan program

peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu pendidikan vokasi. BBPPMPV BMTI berperan sebagai unit pelaksana teknis yang mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PKPLK melalui penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas.

Kebutuhan pendanaan tersebut dikelola melalui penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip efektivitas, efisiensi, pemerataan layanan, serta keberpihakan kepada peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Indikasi kebutuhan pendanaan BBPPMPV BMTI hingga tahun 2029 disajikan sebagai acuan dalam perencanaan program dan pengelolaan sumber daya guna memastikan tercapainya sasaran strategis secara optimal dan akuntabel.

Indikator Kegiatan	Target Capaian				
	2025	2026	2027	2028	2029
Presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	28,820,876	67,398,426	67,398,426	67,398,426	67,398,426
Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	6,916,920	8,485,427	9,716,539	10,947,651	12,178,763
Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	743,232	743,231	806,424	869,617	932,810

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BBPPMPV BMTI Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional lima tahunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan guna mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PKPLK serta pembangunan pendidikan nasional. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang dirancang responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan transformasi ekonomi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia vokasi.

Pelaksanaan Renstra difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan vokasi, penguatan penjaminan mutu pendidikan vokasi, serta peningkatan tata kelola BBPPMPV BMTI yang efektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil agar memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan dan peningkatan kompetensi vokasi.

Keberhasilan implementasi Renstra ini memerlukan komitmen seluruh jajaran BBPPMPV BMTI serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha dan dunia industri. Melalui pengelolaan kinerja berbasis SAKIP serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, Renstra ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam memperkuat kolaborasi, meningkatkan mutu pembelajaran vokasi, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia secara berkelanjutan.

Kepala BBPPMPV BMTI,

Anwar Sidarta

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target					Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi											
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi							210,146,096	451,193,066	459,614,337	468,035,607	476,456,878
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Persen	19.33	22.43	25.81	29.47	33.4	161,730,805	391,236,613	391,236,613	391,236,613	391,236,613
IKK	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga	2,754	3,754	4,754	5,754	6,754	43,427,241	54,715,635	62,631,362	70,547,087	78,462,814
IKK	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh	Rekomendasi Kebijakan	14	28	34	40	47	4,988,050	5,240,818	5,746,363	6,251,907	6,757,452

	satuan pendidikan vokasi											
BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri												
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi											
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Persen	29.07	38.10	47.13	56.16	65.19	28,820,876	67,398,426	67,398,426	67,398,426	67,398,426
7623.SCI.001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	519	1,038	1,038	1,038	1,038	2,597,709	4,666,818	4,666,818	4,666,818	4,666,818
7623.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	1,181	3,083	3,083	3,083	3,083	25,565,959	61,417,192	61,417,192	61,417,192	61,417,192
7623.SCI.004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	38	76	76	76	76	657,208	1,314,416	1,314,416	1,314,416	1,314,416
IKK	Jumlah satuan pendidikan vokasi	Lembaga	472	643	814	986	1,157	7,359,292	9,106,549	10,412,655	11,718,761	13,024,867

	yang meningkat mutunya											
7623.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	1	1	1	1,926,736	2,003,427	4,203,427	4,203,427	4,203,427
7623.RBI.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	1	1	1	1	1	2,276,691	2,200,000			
7623.QDB.001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	472	643	814	986	1,157	3,155,865	4,903,122	6,209,228	7,515,334	8,821,440
IKK	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Rekomendasi Kebijakan	2	4	5	6	7	743,232	743,231	806,424	869,617	932,810
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	5	6	7	252,773	252,772	315,965	379,158	442,351
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	16	16	16	490,459	490,459	490,459	490,459	490,459

Lampiran 1. Definisi Operasional

IKK Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini menghitung proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum dan pelatihan berbasis dunia kerja. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Pendamping Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Instruktur, Teknisi, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Administrasi.
Metode Perhitungan	$e = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$ Keterangan: e: Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja a: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja hingga tahun berjalan b: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri hingga tahun berjalan c: Jumlah Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan hingga tahun berjalan d: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi tahun berjalan
Satuan	%
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sumber Data	Laporan Internal Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

	● Dapodik
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	● RO Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja ● RO Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri ● RO Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan
Interpretasi	Positif yang artinya semakin tinggi Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja mengindikasikan semakin meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: ● Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi ● Instruktur Kursus ● Sarana dan Prasarana Pembelajaran Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya

IKK Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengalami peningkatan mutu berdasar indikator rapor pendidikan. Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya) dan Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (<i>Link and Match</i>/Keterlibatan dunia kerja). Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi Satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya adalah satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai pada indikator rapor pendidikan
Metode Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai pada indikator rapor pendidikan
Satuan	Lembaga
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sumber Data	● Laporan Internal Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi ● Rapor Pendidikan
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	● RO Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi ● RO Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) ● RO Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)
Interpretasi	Positif yang artinya semakin besar jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya mengindikasikan meningkatnya

	mutu pendidikan vokasi.
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: Satuan Pendidikan Vokasi Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendampingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Negeri dan Swasta
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Iya

IKK Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah model pembelajaran vokasi yang dirancang dan dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra dunia kerja dan telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan vokasi. Model pembelajaran yang dikembangkan bersama mitra dunia kerja dapat berupa Model Pembelajaran Berbasis Proyek; Pengembangan <i>Teaching Factory</i>; MOOC (<i>Massive Online Open Courses</i>) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi; Kredensial Mikro; Gamifikasi; Multimedia Interaktif; dan Pengembangan model pelatihan yang selaras dengan dunia kerja; Dunia kerja meliputi badan usaha, industri, dan lembaga lainnya yang dilibatkan dalam mengembangkan model pembelajaran di satuan pendidikan
Metode Perhitungan	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi
Satuan	Model
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sumber Data	Laporan Internal Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	• RO Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • RO Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja
Interpretasi	Positif artinya semakin banyak model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi mengindikasikan semakin meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan vokasi

Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: • Model pembelajaran vokasi • Satuan Pendidikan Vokasi Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik Vokasi Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Lainnya;
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Iya